

## **BAB IV**

### **FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL KEBIJAKAN PEMANGKASAN DANA BANTUAN AUSTRALIA KEPADA INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai teori yang digunakan, berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemangkasan bantuan Australia kepada Indonesia.

Terdapat 2 faktor internal yang mempengaruhi kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia, yakni :

#### **1. Australia Memutuskan Melakukan Penghematan Anggaran Federal**

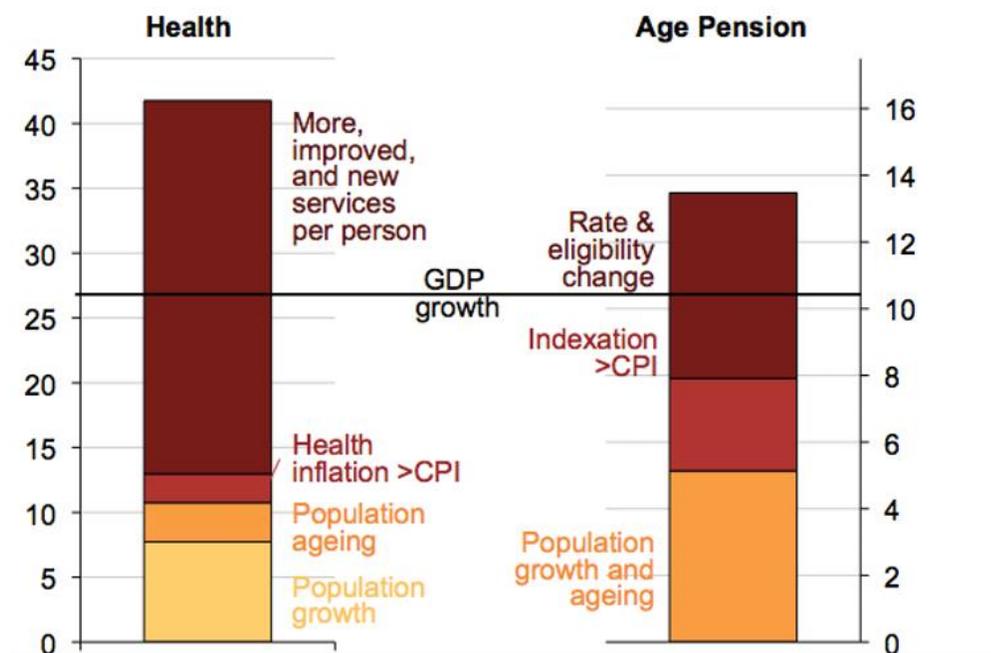
Australia menghadapi keadaan dimana penyeimbangan anggaran merupakan sebuah pilihan yang sulit lantaran ancaman defisit pada satu dekade mendatang. Australia telah mengalami defisit anggaran selama enam tahun yang diakibatkan dari peningkatan pengeluaran pada biaya kesehatan yang berkelanjutan, biaya belanja Negara Australia diprediksi akan semakin jatuh di kemudian hari. Dalam sepuluh tahun kedepan dimungkinkan Australia akan menghadapi defisit anggaran terutama dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membawa Pemerintah Persemakmuran berupaya untuk mendanai inisiatif kebijakan baru yang lebih substansional.

Langkah IMF untuk mendekati diri ke Negara-negara berkembang mengisyaratkan keyakinan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, Negara-negara maju didunia termasuk Australia akan mengalami penurunan ekonomi dan menghadapi ancaman krisis keuangan. Tekanan dari kebutuhan anggaran kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang vital lainnya tumbuh lebih cepat daripada GDP Australia. Pendapatan Negara terancam lantaran Pemerintah

Persemakmuran memilih untuk melakukan penekanan anggarannya sendiri secara substansial dengan mengurang dana rumah sakit dan sekolah-sekolah ke Negara bagian. Kebijakan anggaran di Negara bagian-pun tidak menunjukkan adanya langkah mencari solusi dari kesenjangan pendanaan yang ada. Pemerintah tidak akan dapat mengembalikan keseimbangan anggaran tanpa meningkatkan pendapatan pula.

Dalam enam tahun terakhir, Pemerintahan Persemakmuran telah memberitakan bahwa Australia mengalami defisit Anggaran lebih dari 2% dari PDB. Hal tersebut diasumsikan dalam proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang menunjukkan Australia mengalami defisit antara tahun 2008-2019 dengan hutang bersih diproyeksikan mencapai puncak pada 18% dari GDP tahun 2017, yakni 4% lebih tinggi sepanjang sejarah sejak pertengahan tahun 1990-an.

Selama dekade terakhir, pemerintah menghabiskan tambahan dana sebesar \$ 43 miliar untuk kesehatan. Hal tersebut bukan dikarenakan populasi usia lanjut di Australia yang cenderung lebih sering membutuhkan penanganan kesehatan, namun dari segala usia-pun lebih sering mengunjungi sarana kesehatan baik untuk *check-up* kesehatan maupun operasi dan juga kecenderungan lebih banyak mengkonsumsi obat resep. Pengeluaran untuk pendidikan juga meningkat, pengeluaran untuk kesejahteraan tidak begitu banyak menguras anggaran dikarenakan tingkat pengangguran di Australia yang rendah. Tiga kategori pengeluaran kesejahteraan lainnya yakni pensiun usia tua, cacat dan dukungan keluarga, kesemuanya tumbuh 50% selama dekade terakhir.



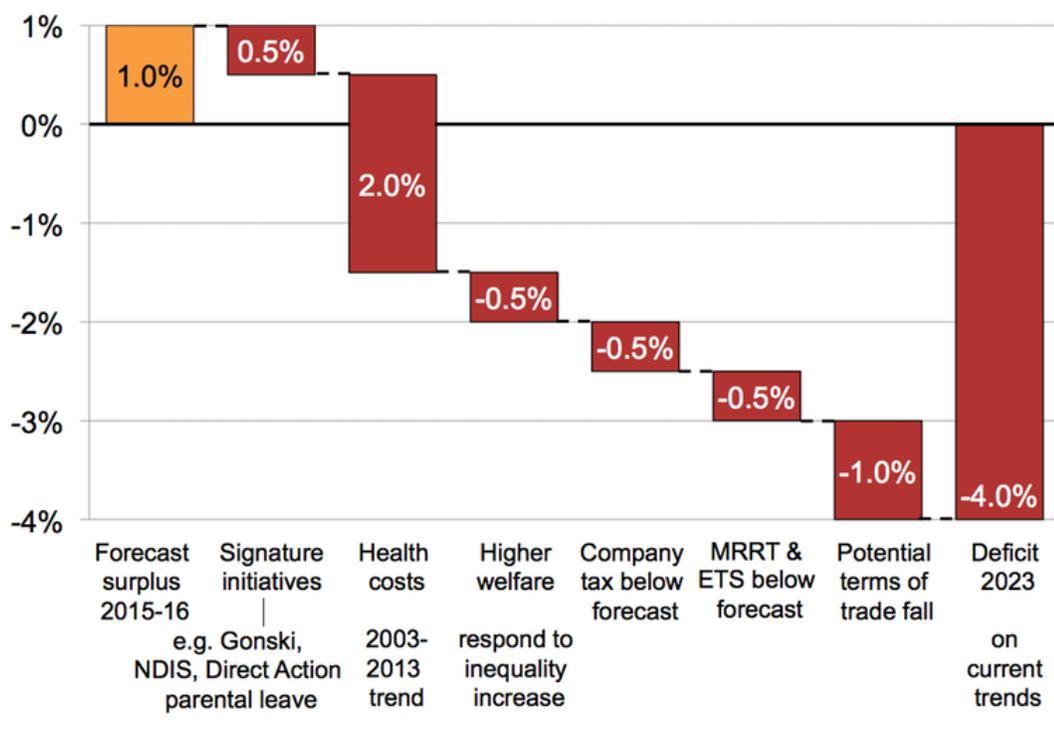
Gambar 17 ; Peningkatan nyata dalam pengeluaran pemerintah tahun 2003-2013 (Daley, 2013)

Jika hal ini terus berlanjut maka pemerintah akan terus meningkatkan anggaran kesejahteraan sebesar 0,5% dari PDB. Peningkatan biaya bukanlah satu-satunya tekanan anggaran yang dihadapi Pemerintah Australia, pajak perusahaan dan pertambangan dan pendapatan harga karbon menempati 1% dari PDB atau senilai \$ 15 miliar per tahun yang tidak sesuai dengan perkiraan. Pendapatan Australia meningkat dikarenakan lonjakan pertambangan dan perdagangan yang tinggi, namun jika harga mineral turun pendapatan juga akan mengalami penurunan 1% dari PDB.

Pemerintah federal dan oposisi mengeluarkan ekspektasi pengeluaran anggaran baru yang substansional pada Skema Asuransi Disabilitas Nasional, sekolah, cuti orangtua berbayar tambahan, carbon *Direct Action* diantara kebijakan-kebijakan yang lainnya yang bahkan dari setengah bagiannya saja bisa menghabiskan 0,5% dari PDB. Selama siklus ekonomi mengalami *boom* dan *bust*, langkah penyeimbangan anggaran dianggap jauh lebih baik daripada mengambil

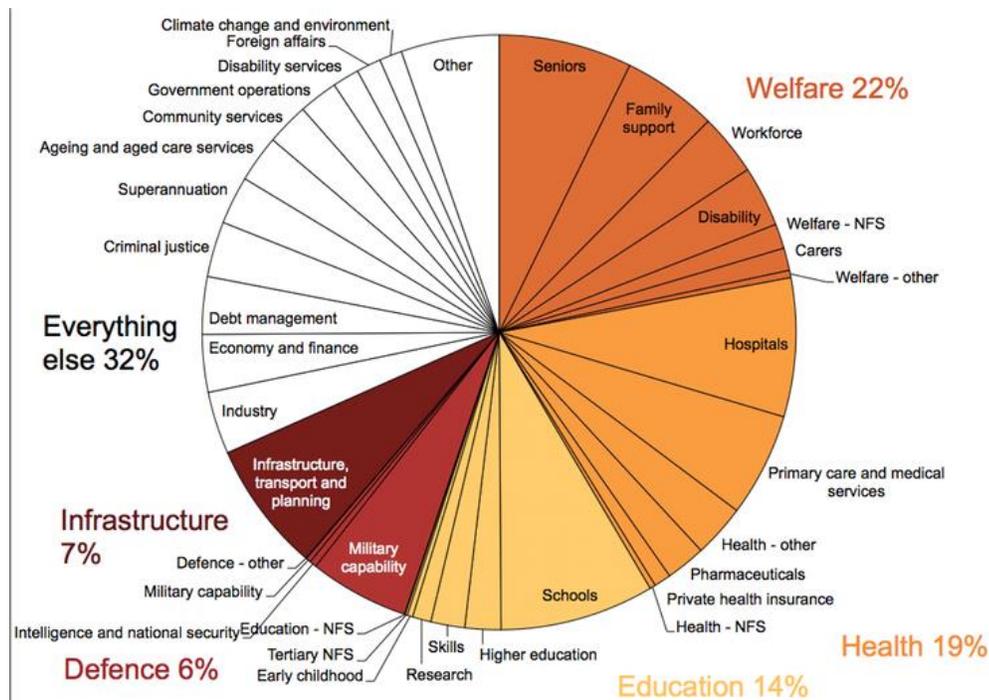
langkah alternative yang bisa beresiko. Defisit yang terus menerus menyebabkan Pemerintah Australia harus membayar bunga, pembatasan pinjaman di kemudian hari yang secara dramatis mengurangi kapasitas pendanaan layanan dan program. Defisit dapat menyebabkan pemerintah kesulitan mengeluarkan uang untuk menangani krisis ekonomi, hal tersebut akan menyebabkan adanya beban hutang di masa mendatang. Politik dianggap sebagai penyebab defisit persisten di Australia.

Dengan adanya tekanan tersebut, para pemimpin yang bertanggungjawab perlu menemukan celah 4% dari PDB dalam simpanan dan kebijakan menaikkan pajak untuk menyeimbangkan pembukuan Australia tahun 2023. Hal tersebut membuat Australia harus melakukan penghematan dan meningkatkan pajak hingga target \$ 60 miliar per tahun dalam beberapa tahun mendatang. Namun hal tersebut sulit dilakukan mengingat pemerintah tidak berminat untuk melakukan penghematan hanya untuk mengembalikan anggaran dalam keadaan surplus lantaran hal tersebut hanya akan bersifat sementara.



Gambar 18 : Potensi defisit Pemerintah Australia (persen dari PDB)

Pengeluaran Pemerintah Australia sebanyak 34% dari PDB dianggap rendah menurut standart OECD, secara global terdapat Negara besar yang menjalankan surplus dan investasi kecil yang terus menerus mengalami defisit. Peningkatan produktivitas dan partisipasi dianggap sebagai langkah yang bagus. Pemerintah Australia memiliki banyak pilihan melalui sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pertahanan dan transportasi dengan lebih dari dua pertiga dari anggaran pengeluaran pemerintah.



Gambar 19 : Pengeluaran Pemerintah Negara Bagian, Negara bagian dan teritori berdasarkan wilayah kebijakan 2012-2013

Agar defisit anggaran setara dengan 12% pengeluaran pemerintah, pemangkasan dari beberapa bidang tersebut tidak dapat dihindarkan. Australia dalam keadaan tidak mampu menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dalam anggaran pendidikan tanpa mencari langkah efisiensi. Layanan kesehatan juga dalam keadaan tidak mungkin mengalami penghematan. Sejarah menunjukkan bahwa satu-satunya upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi adalah dengan mengambil langkah kebijakan yang sulit, dan bukan berarti para jajaran politik harus mengambil langkah agresif namun harus adanya reformasi budaya politik.

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah cenderung menahan reformasi menutupi kekurangan anggaran dengan perolehan anggaran. Hal tersebut yang menyebabkan keadaan kedepan akan lebih sulit untuk mencapai kembali defisit anggaran 4% dari PDB yang justru akan mengharuskan setiap masyarakat harus menanggung dampak beban anggaran. Ekonomi Australia

yang kuat membuat Negara tersebut memiliki banyak cara untuk memperoleh solusi penyeimbangan anggaran, meski begitu Australia berupaya untuk terus menempatkan ekonomi negaranya dalam keadaan aman sampai generasi seterusnya.

## **2. “*New Aid Paradigm*” Sebagai Kebijakan Baru Dana Bantuan Australia**

Program bantuan luar negeri telah lama didefinisikan sebagai salah satu cara untuk memajukan kepentingan nasional Australia dibawah pergantian pemerintahan berturut-turut, baik Partai Buruh maupun Liberal. Hal tersebut tertuang pada Australia “*White Paper*” tahun 2006 dalam kebijakan program bantuan, Pemerintah Howard menyatakan bahwa tujuan resmi dari program bantuan Australia adalah untuk membantu Negara-negara berkembang mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan nasional Australia. Pemerintah Buruh juga mengungkapkan hal yang demikian pada 2012 dimana program bantuan dianggap efektif bagi Australia dengan membuat perbedaan real menyampaikan hasil yang real guna mempromosikan stabilitas dan kemakmuran baik di wilayah Australia maupun di luar. (Australian Government, 2012)

Terpilihnya Tony Abbott dari koalisi Partai Liberal menggantikan Julia Gillard membawa babak baru dalam upaya penyelamatan ekonomi Australia. Pada September 2013, Abbott yang baru menduduki kursi tertinggi di Pemerintahan Australia tersebut membuat kebijakan penghapusan AusAid dan melakukan integrasi fungsi manajemen lembaga bantuan tersebut pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT). Perubahan tersebut tidak diketahui publik sebelumnya, lantaran Abbott maupun Partai Liberal tidak menyinggung mengenai pemangkasan tersebut saat pemilu federal. Salah satu dampak langsung dari keputusan tersebut adalah bahwa program-program yang akan diimplementasikan AusAid pada 2014 harus mengalami penarikan dan mendorong terjadinya beberapa masalah hukum pada DFAT.

Dalam pidatonya pada 1 November 2013, Menteri Luar Negeri Jolie Bishop mengungkapkan bahwa merger antara program bantuan asing dengan dengan program pembangunan dan perdagangan Australia dengan langkah yang koheren, efektif dan efisien tersebut akan memberikan kemajuan terhadap *national interest* Pemerintah Australia melalui kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi internasional dan pengurangan kemiskinan serta sebagai bentuk *support* terhadap kebijakan luar negeri dan perdagangan Australia. (Bishop, 2013)

Hal tersebut adalah upaya menekankan bahwa integrasi AusAid dan DFAT akan memperkuat diplomasi ekonomi sebagai bentuk keterlibatan Australia terhadap ekonomi internasional. Penggabungan AusAid dengan DFAT disebut sebagai upaya menjadikan program bantuan sebagai senjata diplomatik dan memperbanyak serta mempererat agenda kebijakan internasional Australia. Sementara itu, AusAid diketahui telah melalui sejumlah perubahan dalam 40 tahun terakhir termasuk menjadi bagian dari portofolio global yang terus meluas sejak tahun 1977 sampai 2010 yang secara konsisten berhubungan langsung dengan kementerian sejak akhir 1974 sampai pada tahun 2013 dilakukan kebijakan perubahan identitas terhadap AusAid.

Pemerintahan Koalisi Partai Liberal tidak dapat memungkiri bahwa tujuan utama *kebijakan "new aid paradigm"* adalah untuk mempromosikan kepentingan nasional yang secara eksplisit diarahkan untuk kepentingan komersial, keamanan dan juga diplomatik Australia. Pembubaran AusAid dan pelimpahan program bantuan luar negeri ke DFAT serta pengelolaan baru anggaran bantuan Australia sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari "diplomasi ekonomi" Australia.

Julie Bishop selaku Menteri Luar Negeri Australia memperkenalkan sistem kinerja baru dengan membuat perhitungan kinerja, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan Australia. Sistem tersebut menggunakan penilaian kinerja dalam setiap program bantuan Australia untuk mitra termasuk kontraktor, LSM, organisasi multilateral, serta pihak lain yang terlibat dalam

DFAT dalam pemberian bantuan, investasi perorangan, negara, program regional dan global, untuk memberikan informasi mengenai kinerja dari keseluruhan program bantuan Australia. Upaya tersebut dirancang untuk menghubungkan kinerja dengan pendanaan serta memastikan fokus yang kuat pada hasil dan anggaran yang dikeluarkan.

Sistem kinerja baru diperkenalkan dengan membuat perhitungan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan Australia. Sistem tersebut menggunakan penilaian kinerja di semua tingkat program bantuan termasuk dengan mitra seperti kontraktor, LSM, serta organisasi multilateral dan pihak lainnya yang terlibat dengan DFAT dalam penyaluran bantuan juga investasi perorangan, negara, regional maupun global. Pada tingkat tertinggi, keseluruhan program bantuan dinilai dari 10 target strategis dan prioritas kebijakan pembangunan, yakni :

1. *Promoting prosperity* (Mempromosikan kemakmuran)

Mempromosikan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan bantuan Australia untuk investasi perdagangan hingga 20 persen dari anggaran bantuan pada tahun 2020

2. *Engaging the private sector* (Melibatkan sektor swasta)

Dengan melibatkan sektor swasta, semua investasi baru akan mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta atau melibatkan sektor swasta dalam mencapai pembangunan saluran distribusi.

3. *Reducing poverty* (Mengurangi kemiskinan)

Sejak Juli 2015, seluruh wilayah negara dan wilayah membuat rencana *Aid Investment* yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana bantuan Australia mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan jalan keluar dari kemiskinan.

4. *Empowering women and girls* (Memberdayakan wanita dan anak-anak)

Lebih dari 80 persen dari investasi, terlepas dari tujuannya, akan secara efektif mengatasi masalah gender dan implementasinya.

5. *Focusing on the Indo-Pacific region* (Fokus pada wilayah Indo-Pasifik)

Meningkatkan proporsi anggaran program bantuan di kawasan Indo-Pasifik hingga setidaknya sebesar 40% dari periode 2014-15.

6. *Delivering of commitments* (Memberikan Komitmen)

Melakukan kemajuan terhadap kewajiban bersama yang disepakati antara Australia dan Pemerintah dan organisasi mitra utamanya merupakan bagian dari penilaian kinerja program.

7. *Working with the most effective partners* (Bekerja dengan mitra yang paling efektif)

Sejak Juli 2015, sistem baru digunakan untuk menilai kinerja mitra mengenai kunci program bantuan dan memastikan hubungan yang lebih kuat antara kinerja dan pendanaan.

8. *Ensuring value of money* (Memastikan nilai uang)

Memberikan standar nilai tinggi untuk uang dalam setidaknya 85 persen dari investasi bantuan, dan apabila standar tidak terpenuhi serta perbaikan tidak tercapai dalam setahun, maka investasi akan dibatalkan.

9. *Increasing consolidation* (Meningkatkan konsolidasi)

Mengurangi jumlah investasi individu sebesar 20 persen pada 2016-17 untuk memfokuskan upaya dan mengurangi biaya transaksi.

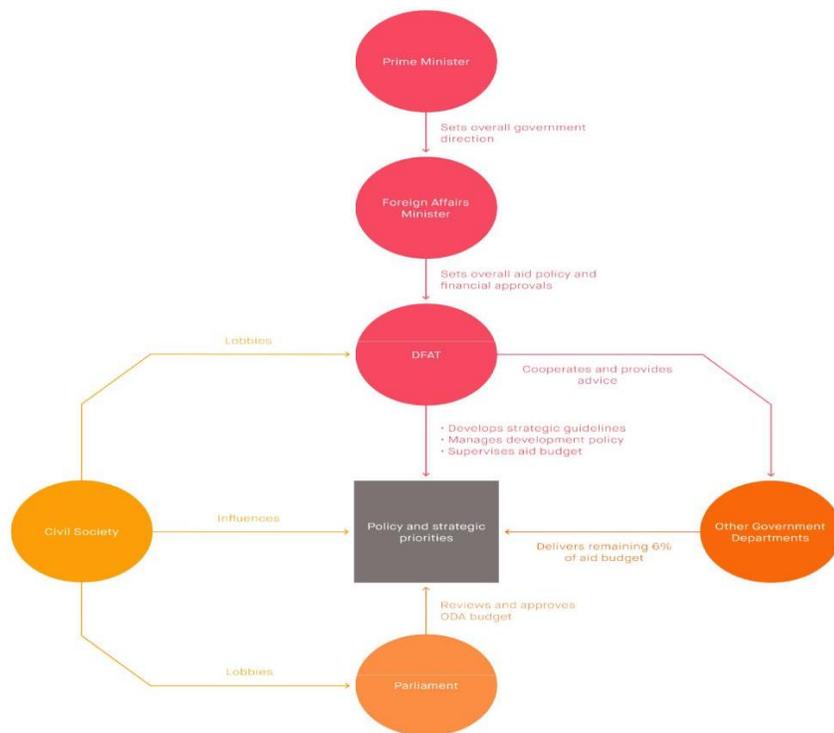
10. *Combating corruption* (Memberantas korupsi)

Kontrol penipuan baru dan strategi anti-korupsi diperkenalkan kepada semua negara dan wilayah.

Dalam upaya penghematan Anggaran Federal, dana bantuan luar negeri selalu menjadi opsi termudah, hal tersebut lantaran kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri tidak memerlukan persetujuan Parlemen dan tidak dapat di blockir oleh Senat. Meskipun bantuan luar negeri merupakan program yang berjalan efektif namun tidak memperoleh banyak perhatian public Australia. Selama periode kepemimpinan Abbott dan Turnbull, Australia telah memangkas lebih dari \$ 11 miliar dana bantuan luar negeri, hal tersebut tidak sejalan dengan mitra OECD lainnya yang meskipun mengalami permasalahan financial terus meningkatkan jumlah anggaran bantuan luar negeri mereka.

Parlemen Australia yang memiliki tanggung jawab untuk menguji Anggaran Federal secara keseluruhan antara bulan Mei dan Juni dan menyelesaikannya sebelum bulan Juli setiap tahunnya akan selalu mempermudah kebijakan mengenai anggaran bantuan luar negeri, karena komponen anggaran pembangunan tidak ditampilkan sebagai subyek utama negosiasi dalam politik anggaran Australia. Kebijakan tersebut biasanya akan diloloskan tanpa amandemen oleh mayoritas

pemerintah di Dewan Perwakilan dan hanya akan mengalami peninjauan pada Senat oleh Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan. Komite tersebut dapat melakukan peninjauan terhadap program pengembangan yang diusulkan namun tidak memiliki kekuatan untuk merubah anggaran. (Development, Donor Tracker Australia, 2017)



Gambar 3 : Sistem kerjasama pembangunan Australia (Development, Australia Donor Tracker, 2017)

*Lowy Institute* menyatakan bahwa pemangkasan dana bantuan Australia merupakan pengorbanan atas upaya penghematan anggaran Federal Australia oleh pemerintah Koalisi yang terbentuk pada tahun 2013. Australia tidak lagi menjadi salah satu negara paling dermawan di dunia dan jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah anggaran bantuan yang terukur dari PNB. Pada bulan Mei 2016, pemerintah mengeluarkan transparansi anggaran federal 2016-17 dan mengkonfirmasi perputaran akhir anggaran bantuan pemangkasan bantuan Australia senilai \$ 224 juta atau 7,4% yang mengisyaratkan sebagai pemangkasan terbesar keenam dalam kurun satu

tahun sepanjang sejarah bantuan Australia. Menurut perkiraan bantuan tersebut akan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu empat tahun kedepan dengan berpatokan dengan tingkan inflasi lantaran dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan tata kelola dana bantuan dibawah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan diawasi langsung oleh Departemen Eksekutif dan empat Departemen Komite lainnya yang bertujuan untuk mengawasi arah strategis dan kualitas program bantuan Australia dengan melibatkan manajer senior dari seluruh departemen, diantaranya adalah :

a. Departemen Eksekutif

Departemen Eksekutif memiliki tanggungjawab penuh untuk departemen prioritas strategis dan manajemen sumber daya, termasuk didalamnya untuk program bantuan Australia. Bertugas mempertimbangkan masalah anggaran dan kebijakan yang memerlukan perhatian tingkat tinggi untuk memastikan kebijakan yang diambil agar sejalan dengan prioritas pemerintah serta kinerja program tingkat strategis.

b. Komite Audit dan Resiko

Memberikan jaminan dan nasihat independent kepada Sekertaris dan Departemen eksekutif mengenai pengaturan dan menejemen resiko dan control terhadap tindak penyelewengan DFAT. Kerangka kerja pengendalian internal, tanggung jawab akuntabilitas eksternal, serta kegiatan audit eksternal dan internal (ANAO), termasuk didalamnya berkaitan dengan program bantuan, Komite bertanggungjawab melaporkan langsung pada Sekertaris.

c. Komite Kebijakan Pembangunan (DPC)

Memberikan visi strategis serta mengawasi kebijakan pembangunan, berperan mengawasi konsistensi agar selaras dengan prioritas Kebijakan Pemerintah Australia dalam keseluruhan program bantuan, mempromosikan inovasi serta mempertimbangkan bukti dan tantangan pembangunan yang muncul, dengan fungsi meliputi :

- Memberikan kepemimpinan kebijakan pengembangan dan saran kepada menteri dan Departemen
- Member nasihat mengenai pengembangan serta implementasi kerangka bantuan strategis
- Memantau pelaksanaan program bantuan DFAT terhadap prioritas pemerintah, bersama dengan kinerja sektoral dan tematis terhadap strategi yang telah disepakati
- Mempertimbangkan prioritas anggaran bantuan strategis
- Member nasihat mengenai pengembangan kebijakan serta strategi sektoral atau prioritas tematis
- Memperkuat manajemen pengetahuan, penelitian, dan pengembangan pengetahuan terhadap isu-isu pembangunan
- Memberikan arahan terhadap partisipasi Australia dalam forum pengembangan utama internasional.

DPC diketuai oleh Wakil Sekertaris, sedangkan bagian sekretariat berada di Divisi Kebijakan Pembangunan (DPD).

d. Komite Investasi Bantuan (AIC)

Bertugas mengawasi portofolio investasi bantuan Australia dan memastikannya sejalan dengan kebijakan pemerintah, mencapai pembangunan yang ditujun serta mendorong nilai mata uang, dengan fungsi sebagai berikut :

- Mengesahkan dan meninjau rencana investasi bantuan (AIP) untuk semua program utama negara dan regional dengan alokasi total bantuan pengembangan resmi tahunan (ODA) sebesar \$ 50 juta atau lebih
- Menyetujui perkembangan untuk merancang konsep investasi beresiko tinggi, atau berniali tinggi sekitar \$ 100 juta atau lebih
- Meninjau jalur pipa investasi bantuan, trend yang telah diidentifikasi dalam Laporan Operasi Bantuan, pelaksanaan rekomendasi dari laporan evaluasi program, dan perubahan signifikan dalam panduan dan praktik manajemen bantuan
- Memberikan nasihat mengenai cara memperkuat kemampuan manajemen departemen bantuan, termasuk dalam proses bisnis serta masalah tenaga kerja

Bagian tersebut diketuai oleh Wakil Sekertaris, sedangkan sekertariatnya berlokasi di Divisi Kontraktor dan Manajemen Bantuan (ACD) yang terdiri dari kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap program bantuan.

e. Komite Evaluasi Independent (IEC)

Yakni badan penasehat yang mengawasi kinerja Kantor Pengembangan Efektivitas (ODE) yang memiliki tujuan untuk memperkuat kualitas, kredibilitas dan kemandirian program kerja ODE yang melibatkan evaluasi dan kinerja serta analisis kualitas, termasuk analisis independen dari Rencana Evaluasi Tahunan dan kinerja Laporan Bantuan Australia.

Kinerja dilaporkan secara transparan terhadap public setiap tahunnya dalam Laporan Kinerja Program Bantuan (APPR), guna memberikan penilaian berbasis bukti terhadap kemajuan tujuan bantuan Australia yang telah ditetapkan oleh AIPs, serta termasuk tindakan manajemen yang telah disepakati. Pada tingkat investasi perorangan, Pelaporan Kualitas Investasi (IQR) menilai dan melaporkan kinerja dan hasil investasi bantuan individual dan mitra pengiriman selama implementasi atau saat penyelesaian.

Program bantuan beroperasi sesuai dengan hukum Pemerintah Australia, termasuk undang-undang yang memiliki efek ekstra-teritorial. Dalam Perundang-undangan Persemakmuran serta instrument lainnya, termasuk didalamnya mengenai :

2. Pemerintahan Umum, Kinerja dan Akuntabilitas Act 2013 (UU PGPA), Peraturan Pengadaan Persemakmuran , dan Peraturan dan Panduan Hibah Persemakmuran untuk mengatur penggunaan uang public yang tepat. Investasi bantuan dapat dikenai audit internal dan juga tinjauan Kantor Audit Nasional Australia (ANAO).

3. Nilai uang merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan untuk semua aspek dalam program bantuan. Prinsip nilai untuk uang DFAT berupaya untuk memastikan pengelolaan bantuan Australia yang efektif , efisien, ekonomis dan etis dengan cara untuk memajukan kepentingan nasional Australia serta mencapai komitmen kebijakan Pemerintah yang mana prinsip-prinsip tersebut mencerminkan persyaratan UU PGPA.

4. Salah satu komitmen kebijakan Pemerintah yang diuraikan dalam kebijakan bantuan Pemerintah Australia adalah mempromosikan kemakmuran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan stabilitas, guna memastikan standar transparansi yang tinggi. Hal tersebut merupakan prinsip etika keuangan yang melibatkan penerbitan informasi yang

komprehensif, mudah diakses dan tepat waktu mengenai program DFAT dalam situs webside.

Usai *The COP21 Climate Change* berakhir di Paris pada Desember 2015, dengan kesepakatan yang telah dideklarasikan oleh para pemimpin dunia sebagai '*the best chance we have to save the one planet we have*'. Australia diketahui hanya membuat komitmen keuangan terbatas untuk upaya adaptasi dan mitigasi. Padahal pada KTT tersebut, Australia menjanjikan A \$ 1 miliar dalam lima tahun kedepan dengan menggunakan 5% dari total anggaran bantuan yang merupakan separuh dari jumlah anggaran yang kredibel dan setara dibawah peringkat negara-negara lain yang berkontribusi terhadap perang melawan perubahan iklim.

Partai Buruh menyatakan bahwa pemangkasan tersebut akan menjadi yang terakhir dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan lebih senilai \$ 800 juta untuk program bantuan Australia selama kurun empat tahun kedepan. Meski begitu angka tersebut masih relative kecil. Di sisi lain, dari partai *The Australian Greens* menyatakan tetap berkomitmen untuk 0,7% bantuan terhadap target GNI tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan baik dari pihak Koalisi maupun Oposisi tidak menunjukkan akan adanya peningkatan pada program bantuan Australia di masa mendatang seperti halnya 10 tahun lalu ketika Australia berada dalam titik surplus ekonomi. (Wade, 2016)

Budaya kebijakan di lingkaran Federal Australia selalu mengalami perubahan, hal tersebut tidak pernah terlepas pada partai politik yang berkuasa dengan cara pencerminan terhadap ideology partai. Dua partai politik terbesar di Australia yakni Koalisi Partai Liberal dan Nasional serta Partai Buruh (ALP) memiliki perbedaan pengaruh filsafat politik yang telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam penentuan perubahan bentuk kebijakan dengan kondisi yang rumit dan beragam. Namun selama beberapa dekade terakhir, kedua belah partai mengangkat isu yang

sama terkait dengan tantangan ekonomi dan politik internasional dalam pertarungannya. (Johanson & Glow, 2008)

Seperti yang tertera dalam *Australia Foreign Policy White Paper 2017* pada bagian *Partnership and Soft Power*, bahwa kekuatan dan keragaman koneksi Australia terhadap dunia diartikan sebagai kemitraan antara semua tingkat Pemerintah. Australia mengutamakan keefektifan kebijakan luar negeri antara Pemerintah Australia, bisnis serta masyarakat sipil. Kekuatan semacam itu sangat berpengaruh terhadap pengaruh Australia di lingkungan Internasional. Australia terus menegaskan keberlanjutan kerjasama dengan berbagai mitra untuk memajukan keamanan dan kemakmuran.

Australia terus menekankan Pemerintah negara bagian, kota dan pusat-pusat regional untuk memperkuat aspek hubungan internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari aspek perdagangan dan investasi global, dengan bantuan dari mitra LSM untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan dan menanggapi krisis kemanusiaan global. Dukungan penting dari *soft power* merupakan kemampuan yang digunakan Australia untuk mempengaruhi perilaku dan kepedulian sosial melalui kekuatan daya tarik dan gagasan. Dengan menggunakan soft power untuk membantu membentuk lingkungan eksternal, Australia dapat mengejar kepentingannya dengan lebih baik secara internasional. Pendekatan kemitraan dan soft power tersebut digunakan Australia untuk melakukan promosi dan branding terhadap citra baiknya dimata dunia secara sistematis dan efektif.

Program bantuan Australia saat ini lebih di fokuskan ke kawasan Indo-Pasifik dengan tujuan mempertajam fokus pada wilayah terdekat, hal tersebut dianggap Australia sebagai upaya perubahan besar. Hal tersebut ditujukan untuk mempromosikan kepentingan nasional Australia dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pengurangan

kemiskinan. Australia mengejar tujuan tersebut dengan berfokus terhadap dua hasil pembangunan yakni mendukung pengembangan sektor swasta dan memperkuat pembangunan manusia.

a. Fokus di Kawasan Indo-Pasifik

Menteri Luar Negeri, Julie Bishop melakukan karantina terhadap kawasan Pasifik dari pemangkasan bantuan Australia dengan alasan adanya fakta bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah bergerak menjauh dari ketergantungan bantuan asing dan menganggap sejumlah negara di Kepulauan Pasifik akan bergantung pada bantuan di masa mendatang. Data terakhir dari Komite Pengembangan bantuan (OECD) menunjukkan bahwa Australia memberikan 60% dari anggaran bantuan ke Kawasan Pasifik.

Australia menyediakan bantuan bilateral senilai US \$ 7 miliar ke 16 negara di kawasan tersebut. Australia berkomitmen untuk mendominasi memastikan menjadi mitra pilihan bagi negara-negara di Kawasan Pasifik, hal tersebut berkaitan dengan ketertarikan Tiongkok dan beberapa negara lain yang mulai tertarik dengan kawasan tersebut. (Institute, 2018)

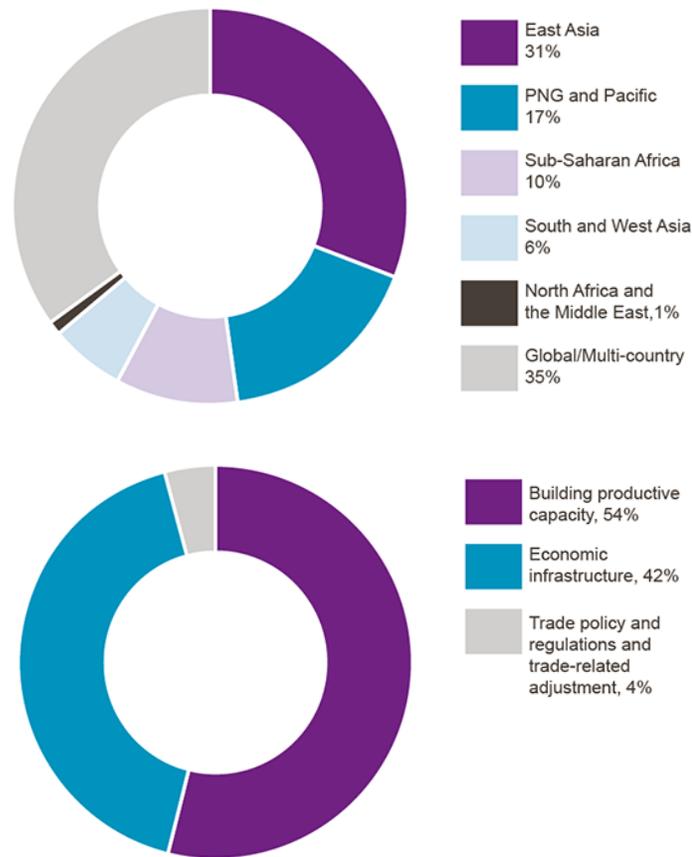
Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri dan Pemimpin Partai Liberal Konservatif pada 21 September 2015, Perdana Menteri Malcolm Turnbull memimpin pengambilan keputusan kebijakan secara menyeluruh. THal tersebut merupakan upaya-upaya untuk mengamankan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas Koalisi Nasional-Liberal baru.

Pembentukan kementerian baru untuk pengelolaan program bantuan Australia dan menunjuk Steven Ciobo, anggota Parlemen dari Partai Liberal selaku mantan Sekretaris Parlemen DFAT untuk diposisikan menjadi Menteri Australia pertama untuk Pembangunan Internasional dan Pasifik dan enam bulan setelahnya terpilih Menteri Perdagangan, sedangkan posisinya

digantikan oleh Senator Concetta Fierravanti-Wells. Dengan kata lain, program bantuan Australia saat ini lebih banyak dipegang oleh para politisi.

b. Prioritas Bantuan Australia Untuk Perdagangan “*Aid for Trade*”

Sesuai dengan strategi Pemerintah Australia saat ini lebih memfokuskan bantuan luar negerinya terhadap promosi kepentingan nasional dengan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan dengan fokus terhadap kawasan Indo-Pasifik. Program bantuan Australia saat ini bukan lagi merupakan sebuah tindakan amal, hal tersebut lebih kepada investasi masa depan di kawasan Indo-Pasifik dengan upaya diplomatic dan keamanannya untuk mempromosikan stabilitas global.



Gambar 4 : Aid for Trade by Region and Sector. (DFAT, 2014)

Dalam website resmi yang dikelola oleh DFAT, Pemerintah Australia menyatakan bahwa “Aid for Trade” merupakan upaya untuk mengatasi kendala internal Negara berkembang dalam perdagangan. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan yang rumit, infrastruktur yang buruk, serta kurangnya keterampilan tenaga kerja. Bantuan Australia untuk perdagangan difokuskan untuk membantu Negara berkembang menciptakan peluang untuk penciptaan lapangan kerja dan untuk membangun mata pencaharian melalui peningkatan perdagangan. Sebagai bagian prioritas dari kebijakan pembangunan baru Australia, bantuan untuk investasi perdagangan memiliki target peningkatan sampai 20% dari total anggaran bantuan Australia pada tahun 2020.

Kebijakan tersebut disertai dengan kerangka kerja kinerja yang dapat dikatakan Pemerintah Australia bertujuan untuk meningkatkan keefektifan program pengembangannya dan memasukkan “*bench-mark*” yaitu sebuah teknik pengetesan dengan menggunakan suatu nilai standar suatu program atau pekerjaan dengan melakukan perbandingan kemampuan dari berbagai kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produksi secara ketat untuk meningkatkan keuntungan.

Australia dengan transparan menyesuaikan investasi dengan konteks negara dan sesuai dengan kepentingan nasionalnya dalam bidang-bidang prioritas dengan keyakinan bahwa pendanaan public mewakili proporsi pembiayaan yang terus dikurangi untuk pembangunan global. Dengan demikian, dokumen strategi pembangunan Australia fokus terhadap pelepasan pendorong pembangunan dan pada kemitraan pembangunan yang matang.

Faktor eksternal kebijakan pemangkasan dana bantuan Australia kepada Indonesia dipengaruhi oleh keadaan dalam negeri Indonesia itu sendiri, sebagai Negara yang pernah menjadi penerima bantuan terbesar Australia dan juga Negara tetangga terdekat Australia, Pemerintah Australia harus melakukan pertimbangan mendalam untuk mengambil suatu kebijakan luar negeri kepada Indonesia.

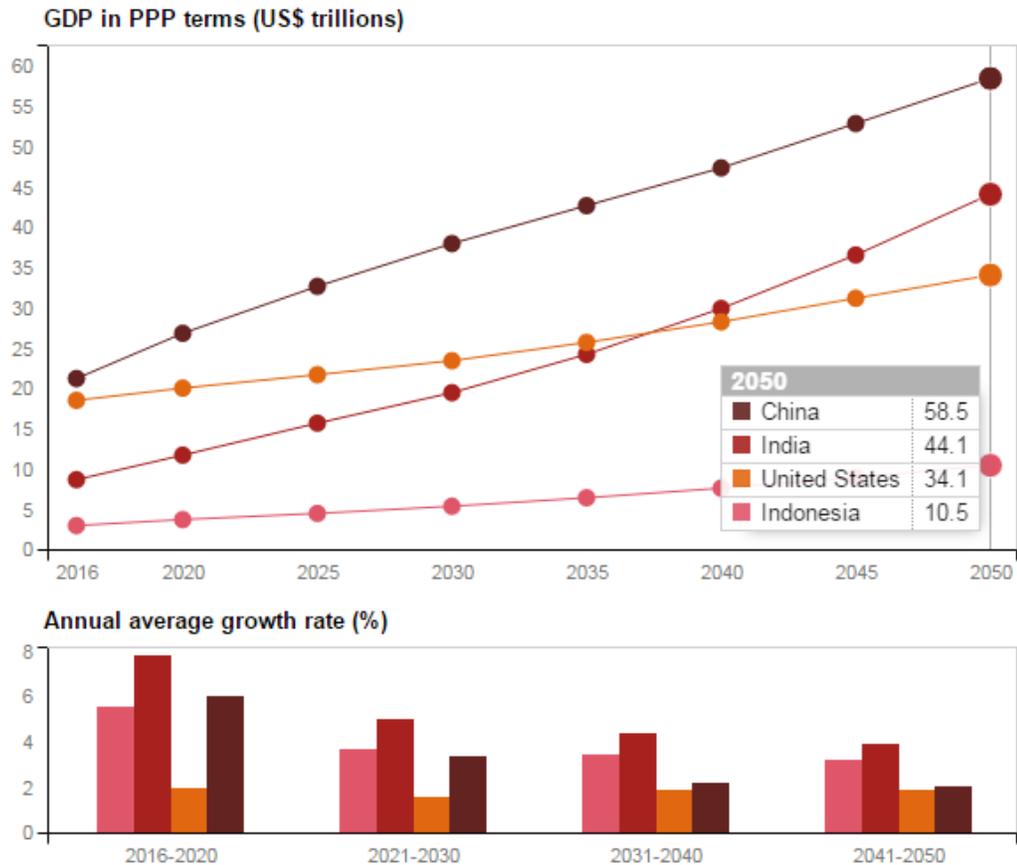
## **Peningkatan Ekonomi Indonesia Sehingga Tidak Perlu Dibantu Lagi**

Kekuatan ekonomi merupakan fondasi kekuatan nasional, dengan landasan itulah Australia mengamati Indonesia dalam pergerakan ekonomi sebagai salah satu yang tercepat didunia. Dalam satu dekade, ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata sebesar 5% per tahun. Meski 10% lebih lambat dibandingkan Tiongkok, namun lebih cepat dibandingkan Negara lainnya. Hal tersebut menjadikan Indonesia terus naik ke peringkat atas table liga ekonomi. Dalam beberapa tahun yang lalu, GDP Indonesia melampaui Australia, hal tersebut membuat Australia berasumsi bahwa Indonesia akan menjadi Negara dengan tingkat ekonomi terbesar didunia pada tahun 2030. Pada saat itu GDP Indonesia akan dua kali lebih besar daripada Australia. Dalam riset IMF, pada tahun 2016 perekonomian Indonesia berada diposisi ke delapan dengan total produk domestik bruto senilai US\$ 3028 miliar.

GDP PPP rankings	2016 rankings		2030 rankings		2050 rankings	
	Country	GDP at PPP	Country	Projected GDP at PPP	Country	Projected GDP at PPP
1	China	21269	China	38008	China	58499
2	United States	18562	United States	23475	India	44128
3	India	8721	India	19511	United States	34102
4	Japan	4932	Japan	5606	Indonesia	10502
5	Germany	3979	Indonesia	5424	Brazil	7540
6	Russia	3745	Russia	4736	Russia	7131
7	Brazil	3135	Germany	4707	Mexico	6863
8	Indonesia	3028	Brazil	4439	Japan	6779
9	United Kingdom	2788	Mexico	3661	Germany	6138
10	France	2737	United Kingdom	3638	United Kingdom	5369
11	Mexico	2307	France	3377	Turkey	5184
12	Italy	2221	Turkey	2996	France	4705
13	South Korea	1929	Saudi Arabia	2755	Saudi Arabia	4694
14	Turkey	1906	South Korea	2651	Nigeria	4348
15	Saudi Arabia	1731	Italy	2541	Egypt	4333
16	Spain	1690	Iran	2354	Pakistan	4236
17	Canada	1674	Spain	2159	Iran	3900
18	Iran	1459	Canada	2141	South Korea	3539
19	Australia	1189	Egypt	2049	Philippines	3334
20	Thailand	1161	Pakistan	1868	Vietnam	3176
21	Egypt	1105	Nigeria	1794	Italy	3115
22	Nigeria	1089	Thailand	1732	Canada	3100
23	Poland	1052	Australia	1663	Bangladesh	3064
24	Pakistan	988	Philippines	1615	Malaysia	2815
25	Argentina	879	Malaysia	1506	Thailand	2782
26	Netherlands	866	Poland	1505	Spain	2732
27	Malaysia	864	Argentina	1342	South Africa	2570
28	Philippines	802	Bangladesh	1324	Australia	2564
29	South Africa	736	Vietnam	1303	Argentina	2365
30	Colombia	690	South Africa	1148	Poland	2103
31	Bangladesh	628	Colombia	1111	Colombia	2074
32	Vietnam	595	Netherlands	1080	Netherlands	1496

Gambar 20 : Skema Proyeksi Perhitungan GDP 32 Negara oleh *PrincewaterhouseCoopers*

Dari pernyataan John Hawksworth selaku Chief Economist PwC, Indonesia akan berada di peringkat ke lima pada tahun 2030 dengan estimasi nilai GDP US\$ 5.424 miliar dan akan naik di posisi ke empat pada tahun 2050 dengan estimasi nilai GDP US\$ 10.504 miliar melalui sistem perhitungan *Purchasing Power Parity* (PPP). Dengan kata lain, Indonesia dinyatakan akan menjadi *big emerging market* dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan ekonomi terkuat di Asia Tenggara.



Gambar 21 : Prediksi Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi 4 Negara

Riset tersebut menegaskan bahwa Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Indonesia akan menempati posisi teratas perekonomian dunia pada tahun 2050. (PricewaterhouseCoopers, 2017) Kebangkitan Indonesia dianggap sebagai salah satu *Great Power* masadepan Asia, meski begitu kenyataannya saat ini Indonesia masih menempati posisi ke-12 mitra dagang Australia. GDP merupakan apa yang menjadi penopang kekuatan nasional, bukan merupakan PDB per kapital. Dalam ilusi sebaliknya bahwa kekuatan nasional bergantung pada PDB per kapital lebih daripada PDB secara keseluruhan.

Hanya saja salah satu upaya Negara Barat untuk menghindari implikasi redistribusi kekuasaan dan pengaruh yang terjadi ketika Negara-negara miskin menjadi kaya dan kekuasaan

akan bukan lagi milik barat. Indonesia adalah salah satu upaya trend perubahan arah kekuatan dunia dimana Australia merupakan Negara Barat yang ada didekatnya.

Berdasarkan pada ukuran Indonesia, ukuran ekonomi suatu Negara ditentukan oleh jumlah pekerja yang dimiliki dan jumlah yang dihasilkan setiap pekerja. Di Negara-negara dengan penduduk besar seperti Tiongkok dan Indonesia meski hanya dalam prosentase kecil peningkatan dalam output per-kapital dikalikan populasi pekerja yang besar, itu berarti peningkatan PDB yang besar pula. Populasi Indonesia sebanyak 250 juta penduduk, yakni sepuluh kali lebih banyak daripada penduduk Australia. Tenaga kerja Indonesia dianggap tumbuh secara proporsional lebih cepat dari tenaga kerja Australia, hal tersebut lantaran populasi muda Indonesia yang besar di usia produktif.

Hal tersebut berarti bahwa setiap orang Indonesia hanya perlu menghasilkan seperlima dari jumlah penduduk Australia agar perekonomian Indonesia dua kali lebih besar dari ukuran Australia. Hal tersebut merupakan masalah yang dihadapi Australia atas Indonesia mengingat perbedaan dari setiap dimensi kehidupan, baik geografi, sejarah, ekonomi, budaya, dan juga bahasa kedua Negara tersebut berbeda. Banyak ahli yang beranggapan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan pesat jika Indonesia sanggup memecahkan masalah korupsi, kelemahan sistem hukum dan juga permasalahan pengambilan keputusan yang sering terdesentralisasi.

Prospek kekayaan yang dimiliki disertai permasalahan kompleks yang dihadapi membuat Indonesia tidak pernah lepas dari mata dunia, salah satunya Australia yang memiliki persepsi akan ancaman dari Indonesia. Reformasi yang efektif akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia setinggi 8% per tahun dalam beberapa dekade mendatang, jika hal tersebut terjadi Indonesia akan mengalami lompatan pada tabel liga ekonomi dan bisa jadi ke posisi keempat pada tahun 2050 mendatang. Dalam study yang dilakukan Citibank pada tahun 2011, bahkan jika pertumbuhan

ekonomi Indonesia tetap di angka 5%, hal tersebut akan membawa Indonesia sebagai pemain ekonomi terbesar di Asia.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang mengganggu Australia, dimana Australia telah menyadari bahwa tetangga dekatnya memiliki potensi kekuatan yang besar dan itu merupakan tugas diplomatik yang cukup besar bagi Australia. Australia tidak ingin melakukan kesalahan, jika terdapat kemungkinan bahwa masadepan Australia akan bisa ditentukan oleh Indonesia. Kenyataannya tidak ada hubungan tulus diantara para pemimpin, buktinya Australia secara tiba-tiba menghentikan eksport ternak tanpa melakukan komunikasi dengan pihak Indonesia.

Disisi lain, peristiwa Timor Timur membuat Indonesia menyesalkan perbuatan Australia dalam upaya mempermalukan Indonesia ketika mengambil peran membantu Timor Timur demi kepentingan peran strategis. Sejak kejadian tersebut, program bantuan merupakan satu-satunya alasan hubungan baik antara Australia dan Indonesia. (White, 2013)

## DAFTAR PUSTAKA

- Australian Government. (2012). An Effective Aid Program for Australia: Making a real difference—Delivering real results. *AusAid*.
- Bishop, J. (2013). *A New Era in Diplomacy*. Canberra: Minister For Foreign Affairs.
- Daley, J. (2013). Australias governments face a decade of budget deficits. *The Conversation*.
- Development, S. (2017). Australia Donor Tracker. *An Initiative by Seek Development*, 5-6.
- Development, S. (2017). Donor Tracker Australia. *An Initiative by SEEK Development*, 6-7.
- DFAT. (2014). *Trade at Glance 2014*. Canberra: Australian Government.
- Institute, L. (2018). Australian Foreign Aid. *The Interpreter*.
- Johanson, K., & Glow, H. (2008). Culture and Political Party Ideology in Australia. *The Journal of Arts and Management Law and Society Vol.29 , No.1*, 1-3.
- PricewaterhouseCoopers. (2017). *The Long View How will the global economic order change in 2050?* United Kingdom: PwC.
- Wade, M. (2016). *Why Australia is stingy and getting stingier*. Sydney: The Sydney Morning Herald <https://www.smh.com.au/opinion/why-australia-is-one-of-the-worlds-stingiest-countries-20160531-gp866s.html> (diakses pada 4 Agustus 2018, pukul 19.26 WIB).
- White, H. (2013). Australia needs a new perspective on its norther neighbour. *The Monthly*.